

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Berlakng**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lokasi BPR pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Status BPR diberikan pada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud untuk menjamin kesatuan dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Bank Perkreditan Rakyat adalah suatu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro kecil dan menengah dengan lokasi yang umumnya dekat dengan masyarakat yang membutuhkan (Wijayanti et al., 2018). Bank

Perkreditan Rakyat berfungsi tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada pengusaha mikro kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Adapun jenis pelayanan yang diberikan pada Bank Perkreditan Rakyat yaitu menghimpun, dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan memberikan kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit kesejahteraan. Kemajuan yang terjadi pada bidang informasi akuntansi mengakibatkan berkembangnya kebutuhan informasi, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dibutuhkannya proses serta kinerja yang berkualitas dalam menghasilkan informasi selain itu sekarang banyak perusahaan yang mengalami kendala dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi ialah saat menghasilkan informasi tersebut (Laili & Aji, 2021).

Momentum bagus adalah tetap bertahannya Bank Perkreditan Rakyat saat krisis perbankan dialami Indonesia, manakala pengelolaan bank-bank besar terbukti bermasalah. Bank Perkreditan Rakyat mencoba tetap sebagai institusi bisnis yang berjalan sesuai *rule* dan tertib aturan Bank Indonesia (BI) sebagai pembina BPR. Ketangguhan eksistensi di puncak krisis ekonomi adalah bukti nyata bahwa BPR mampu mengendalikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan tetap menjaga likuiditasnya. Semakin berkembangnya BPR berarti semakin tersedianya kebutuhan modal bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan pedesaan.

Peran Perbankan dalam perekonomian sangat penting khusus berhubungan dengan perputaran uang. (Intan Fandini & Sunariani, 2020)

menyebutkan bahwa terdapat dua jenis bank yang telah diakui oleh Bank Indonesia yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Keuangan yang serupa dengan bank umum ternyata memiliki penetrasi yang lebih baik khususnya untuk usaha mikro dan kecil. Bank Perkreditan Rakyat menempati posisi yang penting dalam perekonomian rakyat, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat dalam pinjaman dana, baik dana yang akan digunakan sebagai investasi, pendidikan dan lain sebagainya. Keberadaan BPR sangat membantu usaha kecil dan menengah karena dapat melayani masyarakat yang sulit mengakses bank umum didaerah atau desa. Bali merupakan salah satu provinsi yang masyarakatnya sadar akan pentingnya lembaga keuangan yang memudahkan usaha mereka

Laporan keuangan yang berkualitas diperlukan bank perkreditan rakyat sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja kepada nasabah. Sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan dan mengawasi serta berperan penting dalam pendeteksian dan pencegahan penggelapan (*fraud*), sehingga laporan keuangan dapat memberikan keyakinan keandalan (Pramesti dkk, 2021). Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas serta media informasi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan pada pihak lain (Maharani & Agustin, 2021). Menurut PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, informasi dalam laporan keuangan pemerintah di katakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintah yaitu relevan (*relevance*), andal

(*reability*), dapat dipahami (*understandability*) dan dapat di bandingkan (*comparability*).

Laporan keuangan akan bermanfaat bagi pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat di pahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Namun ada juga laporan keuangan yang tidak menyediakan semua informasi yang mungkin di butuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jika terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang tidak signifikan dan akan sulit dipahami (Savira & Suharsono, 2018).

Salah satu karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu andal mengisyaratkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan haruslah disajikan dengan jujur (benar) (Maharani & Agustin, 2021). Tanggung jawab dan wewenang yang dilimpahkan kepada manajemen, maka pihak manajemen harus menyusun laporan keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan bagi manajemen sendiri (intern), dan bagi pihak yang berkepentingan di luar perusahaan (eksternal). Dalam hal pemerolehan informasi mengenai kegiatan operasional perusahaan, tentu saja manajemen sebagai pengelola lebih banyak mengetahui tentang informasi internal, seperti prospek perusahaan dimasa akan datang dibandingkan dengan pihak eksternal terkhusus para pemegang saham. Karena adanya perbedaan pengetahuan mengenai informasi dan mengenai kegiatan operasional ini, manajemen cenderung sering menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan.

Adanya perbedaan informasi yang diperoleh oleh manajemen dan pemegang saham menyebabkan terjadinya asimetris informasi.

Fenomena yang terjadi saat ini salah satu lembaga perkreditan yang ada di kabupaten pati merupakan salah satu perusahaan perbankan yang ikut bersaing dalam memberikan pelayanan bagi para nasabahnya. Kelangsungan hidup BPR sangat ditentukan dari hasil kinerja BPR tersebut. Jika kinerja keuangan di BPR tersebut tidak baik maka BPR akan sulit untuk berkembang dan bertahan. Hal ini terjadi pada BPR Kabupaten Pati. Sepanjang tahun 2020 Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Pati mengalami penurunan dalam segi pendapatan. Kualitas pelaporan keuangan yang kurang transparan membuat para nasabah kurang berminat dan memilih bank konvensional. Terjadinya indikasi kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan pada BPR kabupaten pati sudah tercium. Hasil akhir penilaian kinerja keuangan faktor kualitas aktiva produktif pada PT. BPR artha huda abadi pati berasal dari besarnya rasio PPAP pada tahun 2018 sebesar 84, 41% sehat, tahun 2019 sebesar 88, 25% dan tahun 2020 sebesar 59, 79% kurang sehat. ([www.patikab.go.id](http://www.patikab.go.id)).

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sumber daya manusia. (Maharani & Agustin, 2021) menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan

dasar bagi proses seleksi, suksesi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan sumber daya manusia (Fandini dan Sunariani, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Maharani & Agustin, 2021) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2021) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi sangat penting di era modern sekarang karena Teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja, maka anggota dalam organisasi harus menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Teknologi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik jika para pengguna teknologi memiliki kemampuan terbatas dalam menggunakan teknologi tersebut. Kelemahan dasar individu seperti kelelahan dan kecermatan serta ketelitian dapat mempengaruhi hasil pekerjaan, dengan demikian kompetensi individu dalam perusahaan pun perlu ditingkatkan, yaitu berupa kemampuan untuk mengoperasikan teknologi (Maharani & Agustin, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Laili & Aji, 2021) menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maharani & Agustin, 2021) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. *Good Government Governance* memiliki prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* sangat penting meningkatkan kinerja melalui tercapainya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada publik (Intan Fandini & Sunariani, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Damayanthi dan Merkusiwati, 2018) (Laili & Aji, 2021) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2021) yang menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah disiplin kerja. Disiplin kerja juga merupakan salah satu hal yang penting bagi bank perkreditan rakyat terutama menyangkut kinerja pegawai (Intan Fandini & Sunariani, 2020). Dengan disiplin kerja yang tinggi maka kinerja akan meningkat karena para pegawai akan melakukan secara lebih giat sehingga pekerjaan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih baik. Jiwa kedisiplinan harusnya dimiliki setiap pegawai terutama dalam melaksanakan berbagai pekerjaan dilingkungan kerja tempat pegawai tersebut bekerja. Jadi dengan kata lain disiplin kerja akan

berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam membuat laporan keuangan. Disiplin kerja sangat diperlukan bagi setiap individu namun pada kenyataan tidak semua instansi pemerintah memiliki etos kerja yang baik, hal ini salah satunya terjadi karena disiplin kerja mereka berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh (Laili & Aji, 2021) menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damayanthi dan Merkusiwati, 2018) yang menunjukkan bahwa disiplin tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang beragam. Oleh sebab itu, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Maharani & Agustin, 2021) yang menggunakan variabel pemanfaatan teknologi informasi dan disiplin kerja terhadap kualitas laporan keuangan bank perkreditan rakyat. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel penelitian yaitu kompetensi sumber daya manusia dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Dasar penambahan variabel kompetensi sumber daya manusia adalah pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Pati terjadi indikasi kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Alasan penambahan variabel ini karena kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas harus didukung dengan latar belakang pendidikan, serta memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan kompeten agar tercipta laporan keuangan yang berkualitas. Sumber daya yang



berkualitas akan dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan dan terhindar dari kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan (Maharani & Agustin, 2021). Perbedaan selanjutnya yaitu penambahan variabel penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Wijayanti et al., 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik memilih judul :  
**“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dan Disiplin Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Pati)”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini dengan hanya menganalisis kualitas laporan keuangan yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Kabupaten Pati.

Dengan demikian, ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (X3) Dan Disiplin Kerja (X4) sebagai variabel independen, sedangkan Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebagai variabel dependen.

2. Objek penelitian Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Pati.
3. Penelitian dilakukan setelah proposal disetujui

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas laporan keuangan.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberika manfaat untuk pihak yang lain sebagai berikut :

1. Untuk peneliti, penelitian ini akan memberi pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan didalam melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan disiplin kerja terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk universitas, penelitian ini akan menambah koleksi keilmuan universitas muria kudus dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Untuk bank perkreditan rakyat, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan tentang pengaruh pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan disiplin kerja terhadap kualitas laporan keuangan serta memberikan informasi alternatif solusi pencegahannya.